

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK  
DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK  
PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN  
*RISK MANAGEMENT COMMITTEE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Finansial Non Perbankan yang  
Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**HARISH PRADIPTA DYAKSA  
NIM. C2C008191**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Harish Pradipta Dyaksa  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008191  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika & Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE* (Studi Empiris pada Perusahaan Finansial Non Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)**

Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 24 Mei 2012

Dosen Pembimbing,

Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19760522 200312 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Harish Pradipta Dyaksa  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008191  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika & Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK  
DEWAN KOMISARIS DAN  
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN  
TERHADAP KEBERADAAN *RISK  
MANAGEMENT COMMITTEE* (Studi  
Empiris pada Perusahaan Finansial Non  
Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun  
2009-2010)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Juni 2012.**

Tim Penguji :

1. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Harish Pradipta Dyaksa, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Keberadaan *Risk Management Committee* (Studi Empiris Pada Perusahaan Finansial Non Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 24 Mei 2012

Yang membuat pernyataan,

(Harish Pradipta Dyaksa)

NIM : C2C008191

## **ABSTRACT**

*The aim of this research is to examine the association between board of commissioner characteristics and firm characteristics with the existence of Risk Management Committee (RMC). There are two types of RMC in a company, the one that combined with the audit committee and seperated from the audit committee. Board of commissioner characteristic used in this research are proportion of independent commissioner and board size. While firm characteristics used in this research are auditor reputation, complexity, financial reporting risk, and leverage.*

*Data was collected by using a purposive sampling method towards non-bank financial companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2009 until 2010. There are 79 non-bank financial companies used as samples in this research. The data was analyzed by using logistic regression.*

*The results, based on logistic regression analyses, indicated that board size has significant association with the existence of RMC that combined with Audit Committee. While the proportion of independent commissioner, board size, auditor reputation, and financial reporting risk have a significant association with the existence of RMC that seperated from Audit Committee.*

*Keywords : Corporate Governance, Risk Management Committee, Board of Commissioner Characteristics, and Firm Characteristics.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Terdapat dua tipe RMC dalam suatu perusahaan, yaitu tergabung dengan komite audit dan terpisah dari komite audit. Karakteristik dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dan ukuran dewan. Sedangkan karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan *leverage*.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai 2010. Sebanyak 79 perusahaan finansial non perbankan digunakan sebagai sampel. Data dianalisa dengan menggunakan regresi logistik.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis regresi logistik menunjukkan bahwa ukuran dewan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit. Sedangkan proporsi komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, dan risiko pelaporan keuangan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit.

Kata Kunci : *Corporate Governance, Risk Management Committee, Karakteristik Dewan Komisaris, dan Karakteristik Perusahaan.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Keberadaan *Risk Management Committee* (Studi Empiris Pada Perusahaan Finansial Non Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Much. Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Herry Laksito, SE, M. Adv., Acc., Akt. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ibnu Hartanto dan Ida Parwati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, serta motivasi kepada penulis dan juga kepada Duhita Ayu Paramitha dan Harish Aditya Tihastanto selaku kakak dan adik dari penulis.
8. Eyang Kakung dan Eyang Putri Soelistya, Pakde Hanung, Bude Menik, serta Mbak Widya karena telah bersedia merawat dan memberikan suatu rumah kedua bagi penulis selama menyelesaikan kuliah di Semarang.
9. Tyani Linda Ardilla atas doa, semangat, motivasi, keceriaan, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
10. Rahman dan Septian karena sudah bersedia membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Tiar dan Gagat karena telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini hingga telah selesai dengan baik.
12. Tio, Bambang, Aziz, Daniel, Jauhan, Fajar, William, Adi, Bram, Adul, Ronnie, Samin, Evan, Reza, Al, Agus, Afiq, Dita, Lia, Bunga, Vita, Iik, Lina karena telah memberikan warna persahabatan selama penulis menjalani perkuliahan di Undip Semarang.



13. Teman – teman Akuntansi 2008 Kelas A sebagai teman seperjuangan semasa perkuliahan.
14. Teman – teman KKN Desa Susukan karena telah memberikan pengalaman berharga selama 45 hari ketika masa KKN.
15. Keluarga Seigi Dojo Aiki terkhusus kepada sensei Riki Nelson Sagala karena telah memberikan banyak ilmu mengenai bela diri Aikido dan tentang kehidupan, dan juga kepada semua anggota Seigi Dojo Aiki atas kehangatan dan bantuannya selama ini kepada penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 24 Mei 2012

(Harish Pradipta Dyaksa)

NIM : C2C008191

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*Segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya, karena banyak hal – hal tertentu yang hanya Allah SWT yang tahu.*

*Jangan kalah sebelum perang, segala sesuatu harus dicoba karena kita tidak akan tahu hasilnya sebelum dicoba.*

### **PERSEMBAHAN :**

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

*Papa, Mama, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Calon Pendamping Hidupku.*

*Atas kasih sayang kepadaku yang tak terhingga.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori.....	12

2.1.1 <i>Agency Theory</i> .....	12
2.1.2 <i>Signalling Theory</i> .....	16
2.1.3 Risiko .....	17
2.1.4 Manajemen Risiko .....	17
2.1.5 <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia.....	18
2.1.6 Komite Manajemen Risiko .....	22
2.1.7 Komisaris Independen .....	24
2.1.8 Ukuran Dewan Komisaris.....	25
2.1.9 Reputasi Auditor .....	25
2.1.10 Kompleksitas .....	26
2.1.11 Risiko Pelaporan Keuangan.....	26
2.1.12 <i>Leverage</i> .....	27
2.1.13 Ukuran Perusahaan .....	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran .....	29
2.4 Hipotesis.....	34
2.4.1 Proporsi Komisaris Independen dengan Keberadaan RMC.....	34
2.4.2 Ukuran Dewan dengan Keberadaan RMC .....	35
2.4.3 Reputasi Auditor dengan Keberadaan RMC .....	36
2.4.4 Kompleksitas dengan Keberadaan RMC.....	38

2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan dengan Keberadaan RMC..	39
2.4.6 <i>Leverage</i> dengan Keberadaan RMC.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	42
3.1.1 Variabel Penelitian.....	42
3.1.2 Definisi Operasional Variabel .....	43
3.2 Populasi dan Sampel .....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	48
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	49
3.5 Metode Analisis. ....	49
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
3.5.2 Uji Hipotesis .....	50
<b>BAB IV HASIL .....</b>	<b>55</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	55
4.2 Analisis Data .....	62
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	62
4.2.2 Uji Hipotesis .....	64
4.2.2.1 Menguji Kelayakan Model Regresi.....	64
4.2.2.2 Menguji Keseluruhan Model ( <i>Overall Model</i>	
<i>Fit</i> ) .....	65
4.2.2.3 Koefisien Determinasi .....	66

4.2.2.4 Matriks Klasifikasi .....	67
4.2.3 Menguji Koefisien Regresi .....	70
4.2.3.1 Hasil Uji Hipotesis 1 .....	71
4.2.3.2 Hasil Uji Hipotesis 2 .....	71
4.2.3.3 Hasil Uji Hipotesis 3 .....	72
4.2.3.4 Hasil Uji Hipotesis 4 .....	72
4.2.3.5 Hasil Uji Hipotesis 5 .....	73
4.2.3.6 Hasil Uji Hipotesis 6 .....	74
4.3 Pembahasan .....	74
4.3.1 Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Keberadaan RMC .....	75
4.3.2 Hubungan Ukuran Dewan dengan Keberadaan RMC .....	76
4.3.3 Hubungan Reputasi Auditor dengan Keberadaan RMC ..	77
4.3.4 Hubungan Kompleksitas dengan Keberadaan RMC .....	79
4.3.5 Hubungan Risiko Pelaporan Keuangan dengan Keberadaan RMC .....	80
4.3.6 Hubungan <i>Leverage</i> dengan Keberadaan RMC .....	82
4.3.7 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Keberadaan RMC .....	83
BAB V PENUTUP .....	85
5.1 Simpulan .....	85

5.2 Keterbatasan .....	88
5.3 Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	93

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian .....	57
Tabel 4.2 Jumlah Perusahaan yang Mengungkapkan Keberadaan RMC Tahun 2009 – 2010.....	58
Tabel 4.3 Jumlah Perusahaan yang Mengungkapkan Keberadaan SRMC Tahun 2009 – 2010.....	58
Tabel 4.4 Persentase Perusahaan dengan RMC dan SRMC Menurut Klasifikasi Industri Tahun 2009 – 2010.....	60
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif .....	63
Tabel 4.6 Uji Hosmer and Lemeshow Model Regresi I.....	64
Tabel 4.7 Uji Hosmer and Lemeshow Model Regresi II .....	64
Tabel 4.8 Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir.....	65
Tabel 4.9 Nilai Nagelkerke R Square Model Regresi I .....	66
Tabel 4.10 Nilai Nagelkerke R Square Model Regresi II .....	66
Tabel 4.11 Matriks Klasifikasi Model I .....	68
Tabel 4.12 Matriks Klasifikasi Model II.....	69



Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model I..... 70

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model II..... 70

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran I.....	31
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran II .....	32
Gambar 4.1 Perkembangan RMC dan SRMC Tahun 2009 – 2010 .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel Penelitian .....	93
Lampiran B Hasil <i>Logistic Regression</i> .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 silam, menyebabkan jatuhnya perusahaan – perusahaan di seluruh dunia yang terkena dampak dari krisis ekonomi global tersebut. Hal ini membuat banyak perusahaan berinisiatif untuk meningkatkan corporate governance dengan memberikan perhatian yang signifikan terhadap peran dari manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam praktik manajemen yang baik. Manajemen risiko adalah suatu sistem dan proses mengenai identifikasi, menganalisa, mengevaluasi, merawat, memonitor, dan mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan aktivitas apapun, fungsi atau proses agar perusahaan dapat mengurangi kerugian dan memaksimalkan keuntungan (Zakaria dan Suherman, 2008). Manajemen risiko juga merupakan suatu proses interaktif yang jika dilakukan maka dapat memberikan peningkatan secara terus – menerus dalam suatu pengambilan keputusan.

Perusahaan harus memperhatikan risiko – risiko yang dapat mengancam profitabilitas, eksistensi, serta keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan tersebut.

Lingkungan perusahaan yang semakin berkembang juga berdampak pada semakin kompleksnya risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Sehingga untuk mengatasi segala permasalahan mengenai risiko tersebut diperlukan penerapan sistem manajemen risiko yang terstruktur secara baik. Jika dapat dilaksanakan dengan baik maka sistem manajemen risiko dapat menjadi sebuah mekanisme penting untuk penerapan *good corporate governance*.

Sebuah sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Di tengah situasi perekonomian yang semakin berkembang baik dari internal perusahaan seperti kompleksitas perusahaan yang semakin meningkat dan dari eksternal perusahaan seperti persaingan bisnis yang semakin tidak pasti, sistem manajemen risiko merupakan suatu perangkat utama yang dapat mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang timbul. Sehingga sistem manajemen risiko suatu perusahaan harus dapat berfungsi secara maksimal agar risiko yang paling material dapat diketahui oleh direksi, serta membantu direksi untuk dapat memahami dan mengevaluasi keterkaitan risiko tersebut, pengaruhnya bagi perusahaan, serta bagaimana manajemen sebaiknya menanggapi risiko tersebut (Setyarini, 2011).

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pasti akan menemui risiko, karena risiko berhubungan dengan keberhasilan dan juga kegagalan. Sehingga manajemen suatu perusahaan harus menyadari, mengenali, memonitor, dan mengendalikan risiko tersebut. Informasi mengenai risiko suatu organisasi

tidak hanya penting bagi manajemen, tetapi penting juga untuk pemegang saham, pemasok, kreditor, karyawan, dan stakeholder lainnya.

Informasi mengenai risiko suatu organisasi berguna untuk manajemen dan pemegang saham sebagai suatu indikasi terhadap stabilitas perusahaan dan hasil yang diharapkan. Informasi tersebut juga berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan suatu organisasi untuk menyelesaikan kewajibannya. Untuk pemasok, informasi ini berguna untuk keputusan mereka mengenai kontraknya dengan perusahaan. Bagi karyawan, informasi ini berguna bagi mereka untuk menilai prospek masa depan di dalam perusahaan (Korosec and Horvat, 2005). Sehingga suatu struktur pendukung manajemen risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis agar lebih efektif dan mengungkapkan hasilnya kepada para stakeholder.

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, maka terdapat komite – komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris agar perannya dalam mengawasi jalannya perusahaan menjadi lebih efektif. Komite – komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, dan Komite Manajemen Risiko. Akibat peran dari Dewan Komisaris yang semakin luas maka keberadaan komite – komite tersebut dianggap penting dan bukan lagi sebagai suatu komite yang secara suka rela dibentuk.

Hingga saat ini beberapa perusahaan masih memberikan tugas pengawasan risiko kepada komite audit untuk mencapai manajemen risiko yang sesuai (Krus dan Orowitz, 2009). Jika berhubungan dengan manajemen risiko maka komite

audit berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam, tugas komite audit yang berhubungan dengan manajemen risiko adalah melaporkan risiko – risiko yang terkait dengan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan melaporkan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Dewan Direksi atau manajemen.

Luasnya tanggung jawab serta tugas dari komite audit yang semakin berat menimbulkan keraguan apakah komite audit sudah berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, beberapa perusahaan membuat suatu komite lain yang terpisah dari komite audit dimana komite tersebut dikhususkan untuk menjalankan peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan. Komite ini disebut dengan Komite Manajemen Risiko atau *Risk Management Committee* (RMC). RMC adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di dalam perusahaan. Terpisahnya fungsi dan peran antara komite audit dan komite manajemen risiko diharapkan agar fungsi manajemen risiko perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif.

*Risk Management Committee* (RMC) secara khusus bertugas untuk menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level dewan komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (KPMG, 2001 dalam Subramaniam *et al.*, 2009).

Perkembangan Komite Manajemen Risiko di Indonesia sudah sangat meningkat, khususnya di industri perbankan setelah Bank Indonesia

mengeluarkan peraturan mengenai wajib dibentuk Komite Pemantau Risiko yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006. Istilah Komite Manajemen Risiko di sektor perbankan disebut dengan Komite Pemantau Risiko. Peraturan tersebut berisi tentang penerapan GCG bagi bank umum. Pembentukan Komite Pemantau Risiko ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bank umum dan harus dibentuk paling lambat pada akhir 2007. Bagi bank yang belum membentuk komite tersebut akan dikenakan sanksi dari Bank Indonesia.

Penelitian yang membahas tentang pembentukan RMC masih sangat jarang. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya bukti empiris mengenai formasi dan struktur dari RMC (Subramaniam *et al.* 2009). Selain itu, pembentukan RMC masih bersifat sukarela pada perusahaan selain yang bergerak pada sektor perbankan dimana pembentukan RMC sudah merupakan suatu kewajiban.

Perusahaan finansial selain perbankan juga memiliki tingkat resiko yang hampir sama dengan perbankan, namun belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan finansial selain perbankan tersebut untuk membentuk RMC. Pada perusahaan finansial non perbankan sudah mulai membentuk Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit untuk menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko organisasi, namun, masih terdapat beberapa perusahaan finansial non perbankan tersebut yang mendelegasikan fungsi pengawasan manajemen risiko organisasi pada Komite Audit.



Subramaniam *et al.* (2009) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan teratas yang terdaftar dalam *Australian Stock Exchange* (ASX) dan menemukan bahwa RMC cenderung berada di dalam perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan *Seperate Risk Management Committee* (SRMC) dan kompleksitas perusahaan berhubungan negatif dengan keberadaan SRMC.

Andarini dan Januarti (2010) meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap pengungkapan RMC pada perusahaan non finansial. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Zakaria dan Suherman (2008) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan, risiko bank, dan karakteristik komite audit terhadap pendirian RMC pada perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa aset, kepemilikan, ukuran komite audit dan non performing loan berpengaruh signifikan terhadap pendirian RMC dalam tingkat signifikansi sebesar 10%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian serupa yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009). Penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC pada perusahaan finansial non perbankan yang *go public*. Variabel –

variabel dalam penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya namun dengan beberapa eliminasi dan penambahan.

Penelitian ini menggunakan karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen. Karakteristik dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Karakteristik perusahaan yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan leverage. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Pada penelitian ini mengeliminasi tiga variabel yang digunakan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009) yaitu variabel proporsi direktur non-eksekutif, CEO duality, dan tipe industri. Variabel proporsi direktur non-eksekutif dieliminasi karena tidak relevan dengan sistem yang dianut di Indonesia yaitu *two-tier system*. Jika pada sistem *one-tier* maka fungsi dari direktur non-eksekutif adalah sebagai pengawas direktur eksekutif atau manajemen perusahaan, sedangkan pada sistem *two-tier*, fungsi pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris sehingga variabel proporsi direktur non-eksekutif dieliminasi karena tidak relevan dengan keadaan sistem *two-tier* di Indonesia. Variabel CEO duality dieliminasi karena alasan yang sama dengan variabel proporsi direktur non-eksekutif yaitu karena Indonesia menganut sistem *two-tier*, yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris). Variabel tipe industri juga dieliminasi karena pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan finansial non perbankan yang

tercatat di BEI. Penelitian mengenai pembentukan RMC di Indonesia masih sangat sedikit sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Hingga saat ini penelitian yang membahas tentang pembentukan RMC secara khusus masih sangat jarang. Hal ini dikarenakan bukti empiris tentang formasi dan struktur masih terbatas (Subramaniam, *et al.*, 2009). Selain itu, penelitian ini dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil pada penelitian – penelitian terdahulu. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Finansial non Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 – 2010).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, bahwa aspek pengawasan merupakan salah satu kunci berjalannya suatu sistem manajemen risiko di perusahaan secara efektif. Hingga saat ini masih banyak perusahaan yang memberikan wewenang tugas pengawasan risiko kepada komite auditnya, namun hal ini justru menimbulkan keraguan apakah komite audit berfungsi secara efektif. Sehingga diperlukan suatu komite lain yang khusus menjalankan peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan. Disebabkan oleh penelitian yang masih sedikit mengenai karakteristik dewan komisaris dan karakteristik

perusahaan yang berpengaruh terhadap keberadaan RMC yang diungkapkan dalam annual report mendorong dilakukannya penelitian ini. Dalam hal ini, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
2. Apakah ukuran dewan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC?
4. Apakah kompleksitas berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
5. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
6. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap keberadaan RMC.
2. Memberikan bukti secara empiris pengaruh ukuran dewan terhadap keberadaan RMC.
3. Memberikan bukti secara empiris pengaruh reputasi auditor terhadap keberadaan RMC.
4. Memberikan bukti secara empiris pengaruh kompleksitas terhadap keberadaan RMC.

5. Memberikan bukti secara empiris pengaruh risiko pelaporan keuangan terhadap keberadaan RMC.
6. Memberikan bukti secara empiris pengaruh *leverage* terhadap keberadaan RMC.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan  
Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris, karakteristik perusahaan, dan risiko perbankan terhadap keberadaan RMC pada perbankan.
2. Bagi perusahaan  
Dapat mengetahui arti pentingnya penerapan manajemen risiko oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*.
3. Bagi calon investor  
Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat melakukan investasi dengan melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Bagi penelitian yang akan datang  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau wacana yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

3. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing – masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan deskripsi uji penelitian, analisis data, dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

5. Bab V : Penutup

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran – saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka berisi mengenai landasan teori yang mendukung penelitian ini, pembahasan mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori merupakan dasar teori yang melandasi penelitian, serta berisi mengenai penjelasan mengenai variabel yang terkait dan hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah teori agensi (*agency theory*) dan teori signaling (*signalling theory*).

##### **2.1.1 Agency Theory**

Teori agensi merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang telah dipakai selama ini. Teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk sebuah kontrak kerjasama.

Teori agensi menyediakan suatu dasar pikiran teoritis yang melimpah untuk memahami proses – proses dan desain organisasi dari perspektif prinsipal – agen (Subramaniam, *et al.*, 2009). Teori ini mengasumsikan bahwa setiap

individu, baik prinsipal maupun agen bertindak atas kepentingan mereka sendiri sehingga seringkali terdapat pertentangan antara pemegang saham dengan manajer. Pertentangan ini muncul akibat adanya keinginan dari para manajer untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya sendiri. Pada pihak lain, para pemegang saham menginginkan untuk memaksimalkan keuntungannya, pertentangan kemudian timbul apabila keputusan yang dibuat oleh para manajer guna memaksimalkan kepuasannya sendiri tersebut ternyata tidak mensejahterakan pemegang saham (Kiswara, 1999).

Ada beberapa konflik dalam hubungan antara prinsipal dengan agen (*agency conflict*), konflik yang timbul sebagai akibat dari keinginan manajemen (agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (prinsipal) untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan. *Agency conflict* timbul pada berbagai hal berikut :

1. *Moral-Hazard*

Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

2. *Earning Retention*

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif.



### 3. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah risiko bagi perusahaannya walaupun mungkin hal itu bukan pilihan yang terbaik bagi perusahaan.

### 4. *Time Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berfokus pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi dan kurang atau tidak berfokus pada proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV yang jauh lebih besar. (Alijoyo dan Zaini, 2004)

Masalah lain yang akan timbul dari hubungan prinsipal-agen ini adalah agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal, sehingga akan menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi (Indrayati, 2010).

Agen diasumsikan untuk berperilaku berdasarkan kepentingan mereka sendiri (Jensen and Meckling, 1976; Subramaniam *et al.*, 2009) dan prinsipal

mempunyai dua kesempatan utama untuk mengurangi biaya yang timbul dari masalah keagenan tersebut :

1. Mengawasi perilaku agen dengan mengadopsi auditing dan mekanisme *governance* yang lain yang menyelaraskan kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal.
2. Menyediakan insentif pekerjaan yang menarik kepada agen dan mengatur ulang struktur *reward* yang dapat mendorong agen untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Penggunaan teori agensi telah banyak digunakan pada penelitian – penelitian sebelumnya khususnya tentang keberadaan komite (Ruigrok, *et al.*, 2006 dan Benz dan Frey (2007) dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Keberadaan komite yang dimaksud adalah komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, serta komite manajemen risiko.

Secara umum, komite – komite tersebut merupakan mekanisme pengawasan internal di dalam perusahaan dan keberadaan komite pengawas yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut menyediakan kualitas pengawasan yang lebih baik dan menuntun untuk menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Komite – komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut diperkirakan ada dalam situasi dimana biaya agensi tinggi, seperti *leverage* tinggi serta kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar (Subramaniam, *et al.*, 2009).

### 2.1.2 *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Teori sinyal muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Oleh karena itu, untuk mengurangi asimetris informasi yang akan terjadi perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan.

Ketika diterapkan untuk praktik *disclosure* perusahaan, teori sinyal mengusulkan bahwa teori tersebut umumnya bermanfaat bagi organisasi untuk mengungkapkan inisiatif dan praktik *corporate governance* yang baik sehingga menciptakan citra yang baik di pasar (Subramaniam, *et al.*, 2009). Selain itu, teori sinyal juga dapat menunjukkan konsistensi yang besar terhadap adanya pengungkapan yang luas, yaitu bahwasanya perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi dengan baik berarti perusahaan tersebut mengasingkan diri dari memiliki kesan yang baik, yaitu bersifat informatif terhadap pasar mengenai keberadaannya (Kiswara, 1999).

Subramaniam, *et al.*, (2009) juga menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada suatu kewajiban untuk perusahaan membentuk RMC. Menurut teori sinyal, sebuah perusahaan mungkin membentuk RMC sebagai komitmennya terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik dan dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.

### 2.1.3 Risiko

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, risiko selalu ada di setiap aspek kehidupan manusia sehari – hari. Risiko akan selalu ada apabila apa yang akan terjadi di masa yang akan datang belum diketahui dengan pasti dan risiko ini akan selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut Sonnidwiharsono (1996) dilihat dari sudut kegiatan usaha, pengaruh kegiatan usaha modern khususnya dalam sektor industri bertambah kompleks. Bertambah kompleksnya kegiatan usaha ini telah membawa pengaruh pula pada kebutuhan untuk lebih khusus memperhatikan risiko – risiko yang dihadapi perusahaan.

Risiko juga dapat mengakibatkan kehancuran organisasi, karena itu risiko penting untuk dikelola. Risiko juga diyakini tidak dapat dihindari, oleh karena itu pemahaman terhadap risiko merupakan suatu langkah untuk menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi.

### 2.1.4 Manajemen Risiko

Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa dapat bertahan. Kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan (Walker, *et al.* dalam Yatim, 2009). Oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan *Enterprise Risk Management* (ERM) untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin muncul. Pada tahun 2004, COSO telah menerbitkan *Enterprise Risk Management-Integrated*

*Framework* yang menggambarkan komponen – komponen penting, prinsip dan konsep dari manajemen risiko perusahaan untuk seluruh organisasi, tanpa memandang ukurannya.

Sukamto (n.d) menyebutkan bahwa inti dari manajemen risiko perusahaan yaitu bahwa setiap entitas memiliki nilai untuk *stakeholder*. Semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola, mengidentifikasi, seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai *stakeholder*. Manajemen risiko perusahaan membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan risiko dan peluang dengan tujuan untuk mempertinggi nilai. Oleh karena itu, struktur manajemen risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis secara lebih efektif dan mengungkapkan hasil manajemen risiko kepada *stakeholders* organisasi (Subramaniam *et al.*, 2009).

### **2.1.5 Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia**

*Corporate Governance* telah menjadi pokok bahasan yang penting bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tuntutan persaingan global menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya reformasi GCG (Alijoyo dan Zaini, 2004). Saat ini terdapat tuntutan yang besar dan ada kecenderungan bahwa manajemen perusahaan – perusahaan publik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada publik (Syakhroza, 2004).

Keberhasilan penegakan GCG sangat ditentukan oleh kualitas pimpinannya yaitu komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pelaksana. Dalam mekanisme *corporate governance*, dewan komisaris memiliki peranan dan tugas yang sangat penting. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dewan komisaris dapat memberikan kontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang relevan bagi para *stakeholders*.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tugas utama dewan komisaris adalah :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis – garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan bilamana perlu.

5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi di dalam perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. *One tier system* atau sistem satu tingkat banyak dianut oleh negara yang cenderung mengikuti hukum *anglo-saxon (common law)*, sedangkan *two tier system* atau sistem dua tingkat banyak diterapkan di negara – negara Eropa dan negara – negara lain yang menganut *civil law*, termasuk Indonesia.

Dalam *one-tier system*, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu kesatuan yang disebut dengan *Board of Director*. Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam *two-tier system*, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh dewan direksi.

Dalam *two-tier system* sangat jelas ada perbedaan antara fungsi pengambilan dan pelaksanaan kebijakan dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya dijalankan oleh dewan direksi. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh dewan direksi dilakukan oleh dewan komisaris. Berbeda dengan *one-tier system* yang tidak jelas siapa yang menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya yang begitu luas, Dewan Komisaris dapat membentuk suatu komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris agar berjalan secara lebih efektif. Menurut Harrison (dikutip oleh Subramaniam, *et al.*, 2009) ada dua tipe komite – komite dewan. Tipe yang pertama merupakan komite yang menjalankan peranan penting dalam memberikan masukan kepada manajemen dan dewan komisaris pada pengambilan keputusan bisnis yang penting bagi perusahaan, contohnya komite perencanaan strategis. Tipe yang kedua berhubungan dengan fungsi *monitoring* atau pengawasan dari dewan, seperti komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi. Komite – komite tersebut secara spesifik dapat meningkatkan akuntabilitas dari dewan sebagaimana mereka menyediakan pengawasan independen dari berbagai aktivitas dewan.

Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris sebagai salah satu organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit timbul sebagai akibat peran pengawasan dan dewan komisaris perusahaan pada umumnya belum memadai. Pentingnya komite audit dalam suatu perusahaan terbuka dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. Se-03/PM/2000 tentang komite audit. Ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan publik atau emiten untuk memiliki komite audit (Indra dan Yustiavandana, 2008).



### **2.1.6 Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)**

Saat ini, keberadaan RMC dirasa sebagai sebuah pengawasan penting komite dewan (Fields and Keys dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Secara umum, luas area tanggung jawab dari RMC adalah :

1. Menentukan strategi manajemen risiko organisasi.
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi.
3. Menilai pelaporan keuangan organisasi.
4. Memastikan bahwa organisasi patuh terhadap peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

RMC bertanggungjawab kepada dewan komisaris dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004). Krus and Orowitz (2009) mengatakan pentingnya dibentuk suatu komite yang terpisah dari komite audit dalam pengawasan risiko perusahaan. Selama ini, banyak perusahaan yang menugaskan pengawasan risiko perusahaan kepada komite auditnya. Pentingnya pengawasan risiko dan keberadaan risiko, perusahaan mungkin akan mempertimbangkan untuk membuat sebuah komite yang khusus menangani pengawasan risiko perusahaan agar berjalan secara efektif.

RMC dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan dalam tanggungjawabnya terhadap pengawasan risiko, manajemen risiko dan pengendalian internal (Subramaniam, *et al.*, 2009). Dengan membentuk sebuah komite yang terkhususkan, seperti RMC akan mungkin untuk mencurahkan waktu dan usaha yang lebih banyak dengan menyatukan berbagai risiko dan

mengevaluasi pengendalian yang berhubungan secara keseluruhan (Subramaniam, *et al.*, 2009). RMC merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. RMC bertugas untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengawasi, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan meskipun tanggung jawab atas pengelolaan risiko berada di tangan komisaris dan direksi (Effendi, 2009)

Setiap bank yang tercatat dalam BEI harus memiliki RMC paling lambat hingga 30 Juni 2007 berdasarkan PBI No. 8/4/2006. Peraturan tersebut mengharuskan tiap bank tercatat untuk memiliki RMC, komite audit, komite remunerasi dan nominasi (Zakaria dan Suherman, 2008). Hal ini sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh bank umum tentang penerapan GCG.

Dibandingkan dengan sektor non-perbankan, risiko yang terdapat pada sektor perbankan lebih banyak dan jauh lebih kompleks. Terdapat 9 (sembilan) risiko yang dihadapi mulai dari risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (Fajri, 2007). Oleh karena itu, Bank Indonesia mengakomodir hal ini dengan mewajibkan pembentukan Komite Pemantau Risiko yang sekurang – kurangnya memiliki fungsi untuk melaksanakan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas RMC dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di tingkat direksi.

### 2.1.7 Komisaris Independen

Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG. Komisaris menurut kode tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan memberi nasihat bilamana diperlukan (Juwitasari, 2008). Namun terkadang dewan komisaris di suatu perusahaan belum bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap direksi dengan baik (Kusuma, 2004 dalam Yuliandri, 2010). Oleh karena itu, adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat meningkatkan peran dari dewan komisaris sehingga tercipta *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan.

PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) melalui Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No : Kep-305/BEJ/07-2004 di dalam Pencatatan Efek No 1 – A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Saham dan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang – kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris.

### **2.1.8 Ukuran Dewan Komisaris**

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, jumlah dewan direksi dan dewan komisaris berbeda – beda. Jumlah dewan yang besar dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam perusahaan (Indrayati, 2010). Jumlah anggota dewan komisaris setidaknya harus lebih besar atau minimal sama dengan jumlah anggota dewan direksi, karena apabila jumlah anggota dewan komisaris lebih sedikit dibanding dengan jumlah dewan direksi, maka akan terdapat kemungkinan anggota dewan komisaris mendapat tekanan psikologis jika ada perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut (Indrayati, 2010).

Ukuran dewan komisaris akan berdampak pula terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004). Jika jumlah dewan anggota dewan komisaris yang terlalu sedikit mungkin akan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah dan mungkin pengawasan terhadap keputusan yang telah diambil juga akan rendah.

### **2.1.9 Reputasi Auditor**

Auditor merupakan kunci mekanisme pengawasan eksternal dari sebuah organisasi, dan dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian bagi manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Auditor eksternal juga dapat mempengaruhi

sistem pengawasan internal klien dengan membuat rekomendasi *post-audit* pada peningkatan desain dari sistem (Subramaniam, *et al.*, 2009). Auditor dengan reputasi baik seperti *Big Four* juga cenderung untuk lebih memilih hubungan dengan klien yang memiliki nilai yang baik dalam konsultasi bisnis, oleh karena itu auditor *Big Four* akan mempengaruhi klien untuk bertindak sesuai dengan praktek terbaik. (Carson, 2002 dalam Andarini, 2010).

Auditor Big Four dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan internal yang lebih tinggi kepada kliennya dibandingkan dengan dengan auditor non-Big Four (Cohen *et al.*, 2004 dalam Subramaniam *et al.*, 2009).

#### **2.1.10 Kompleksitas**

Kompleksitas suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Organisasi dengan jumlah segmen bisnis yang besar biasanya memiliki bermacam – macam produksi, departemen – departemen atau strategi pemasaran (Subramaniam *et al.*, 2009). Sebagai hasilnya, kompleksitas yang lebih besar meningkatkan risiko pada tingkat level yang berbeda termasuk risiko operasional dan teknologi yang menuntun terhadap permintaan yang lebih besar untuk mengawasi risiko tersebut (Subramaniam *et al.*, 2009).

#### **2.1.11 Risiko Pelaporan Keuangan**

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan

Horvat, 2005 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Dengan proporsi piutang usaha yang lebih besar maka risiko piutang tak tertagih dan piutang diragukan yang diakui dengan tidak tepat juga akan bertambah besar.

#### **2.1.12 Leverage**

*Leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah perusahaan, hal ini disebabkan akibat semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan dan sebaliknya apabila rasio *leverage* rendah maka risiko keuangan atau risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin rendah.

Semakin besar rasio utang dengan aset atau rasio utang dengan ekuitas, berarti makin besar risiko keuangan perusahaan, karena semakin besar risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetap berupa bunga ataupun pelunasan utang pokoknya dalam situasi perekonomian yang memburuk (Halim, 2007 dalam Yuliandri, 2010).

#### **2.1.13 Ukuran Perusahaan**

Ada beberapa macam variabel yang secara umum digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu total aset, total penjualan, dan jumlah karyawan (Nico, 2010). Dalam hal ini, ukuran perusahaan yang dipakai yaitu total aset. Total aset menggambarkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin

besar sumber daya yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula skala/ukuran perusahaan. Sebaliknya, jika semakin kecil sumber daya yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil pula ukuran perusahaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan yang menguji tentang pembentukan komite secara sukarela yang dihubungkan dengan berbagai macam variabel independen. Namun umumnya, penelitian yang telah dilakukan lebih banyak membahas tentang pembentukan komite audit secara sukarela. Penelitian mengenai pembentukan RMC sendiri masih sedikit untuk diteliti.

Subramaniam *et al.* (2009) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan teratas yang terdaftar dalam *Australian Stock Exchange (ASX)*. Penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik dewan dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC di sebuah perusahaan. Penelitian ini juga untuk mengetahui tipe RMC, apakah RMC tergabung dengan komite audit atau terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri (SRMC). Karakteristik dewan dalam penelitian ini terdiri dari proporsi direktur non-eksekutif, CEO *duality*, dan ukuran dewan. Sedangkan karakteristik perusahaan terdiri dari tipe auditor eksternal, tipe industri, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan *leverage*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. CEO

independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC dan kompleksitas berhubungan negatif dengan keberadaan SRMC.

Penelitian yang dilakukan Andarini dan Januarti (2010) menguji hubungan karakteristik dewan komisaris (proporsi komisaris independen dan ukuran dewan) dan karakteristik perusahaan (reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, dan ukuran perusahaan) terhadap pengungkapan RMC. Penelitian ini menggunakan sampel 248 perusahaan non-finansial yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan RMC dan SRMC.

Yatim (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pembentukan RMC dan struktur dewan. Penelitian ini menggunakan sampel 690 perusahaan yang listing pada Bursa Malaysia pada tahun 2003. Variabel independen yang digunakan yaitu proporsi komisaris independen, CEO independen, keahlian dewan, dan kerajinan dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan CEO independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang berdiri sendiri. Perusahaan dengan keahlian dan kerajinan dewan yang tinggi juga berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Komite Manajemen Risiko merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan manajemen



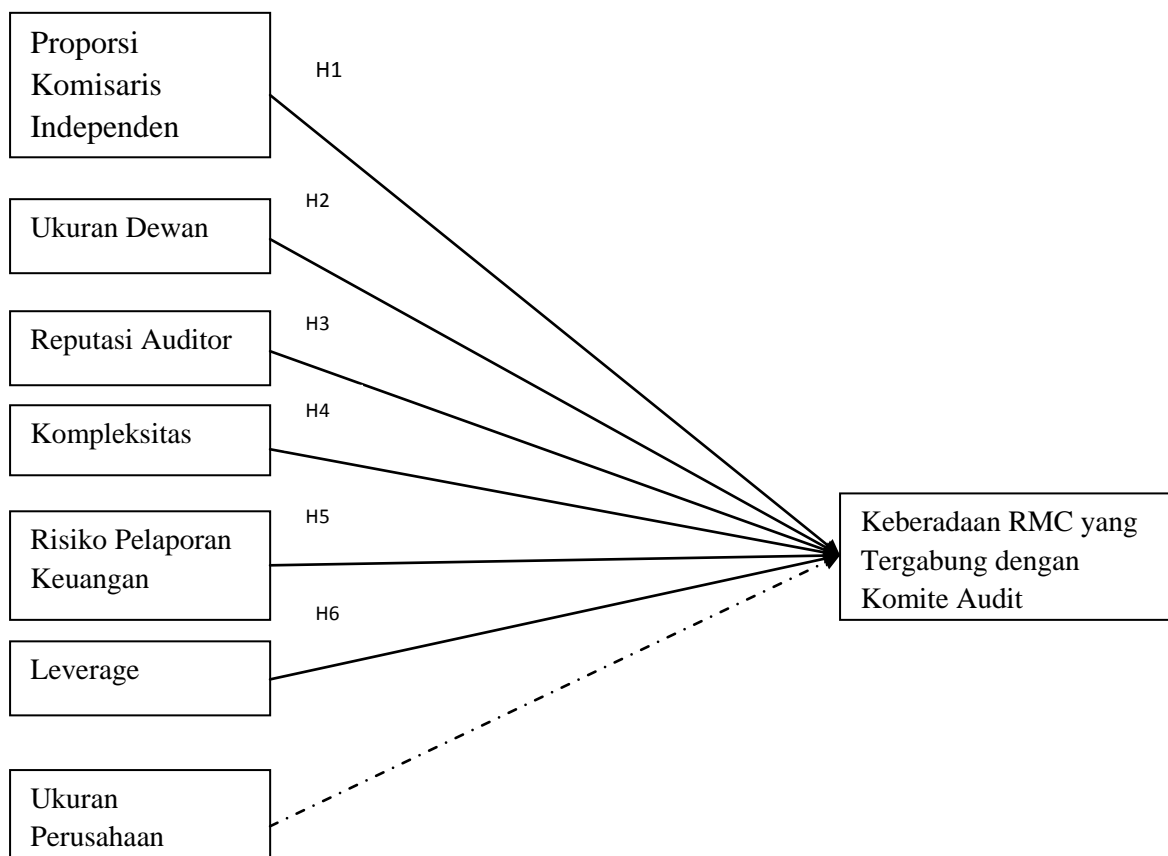
risiko di dalam perusahaan. Selama ini, banyak perusahaan yang menugaskan pengawasan risiko perusahaan kepada komite auditnya. Oleh karena itu beberapa perusahaan khususnya perusahaan dalam industri perbankan perlu membuat komite khusus agar tugas pengawasan risiko perusahaan berjalan efektif. RMC dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mendukung dewan dalam tanggungjawabnya terhadap pengawasan risiko, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris, karakteristik perusahaan, dan risiko perbankan terhadap keberadaan RMC. Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel independen karakteristik dewan komisaris yaitu proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan, kemudian karakteristik perusahaan yaitu reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, kompleksitas, dan *leverage*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran I**



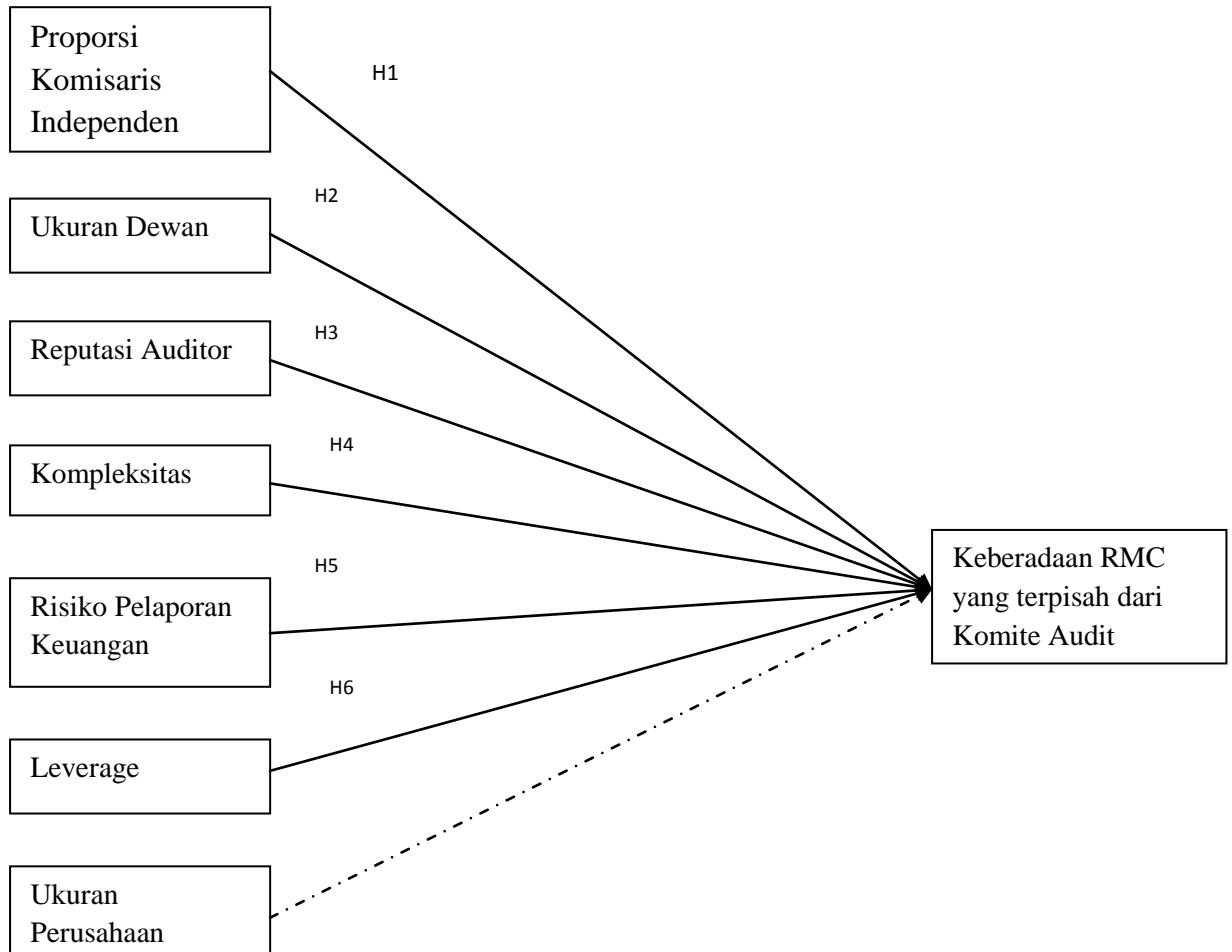
Keterangan :

————— : Variabel Independen

- - - - - : Variabel Kontrol

Gambar 2.2

## Kerangka Pemikiran II



Keterangan :

————— : Variabel Independen

- - - - - : Variabel Kontrol

Atas dasar gambar kerangka pemikiran I dan II di atas, dapat dijelaskan bahwa proporsi dewan komisaris, ukuran dewan, reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, kompleksitas, dan *leverage* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan RMC dan RMC yang terpisah dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Proporsi dewan komisaris mempengaruhi keberadaan RMC dikarenakan perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan, dan dengan membentuk RMC dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggungjawab pengawasan manajemen risiko. Ukuran dewan juga mempengaruhi keberadaan RMC karena ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite – komite yang dibentuk dewan komisaris yang ditunjukkan untuk manajemen risiko. Reputasi auditor mempengaruhi keberadaan RMC karena tekanan yang lebih besar akan terdapat pada perusahaan yang menggunakan jasa audit *Big Four* untuk membentuk RMC. Kompleksitas mempengaruhi keberadaan RMC karena semakin besar segmen bisnis yang dimiliki perusahaan maka akan membutuhkan mekanisme manajemen risiko yang efektif sehingga perlu dibentuk RMC. Risiko pelaporan keuangan mempengaruhi keberadaan RMC karena perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi sehingga perlu dibentuk adanya RMC. *Leverage* mempengaruhi keberadaan RMC karena semakin besarnya pendanaan

perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan sehingga perlu dibentuk adanya RMC.

## **2.4 Hipotesis**

Di bagian ini dijelaskan berbagai rumusan hipotesis dengan argumentasinya. Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

### **2.4.1 Proporsi Komisaris Independen dengan Keberadaan RMC**

Menurut teori *agency*, untuk mengurangi biaya yang timbul dari masalah keagenan adalah dengan mengawasi perilaku manajemen, salah satunya melalui dewan komisaris. Untuk mendukung pengawasan yang lebih baik maka diperlukan komisaris independen agar pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih efektif karena independensi adalah hal yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Proporsi komisaris independen dalam suatu dewan merupakan sebuah indikator independensi dari dewan. Suatu dewan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009). Pincus, *et al.* (1989) dalam Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen di dalam sebuah dewan akan meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka tidak berhubungan dengan perusahaan sebagai pegawai, dan mereka juga berperan sebagai perwakilan independen dari kepentingan *shareholders*.

Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar akan memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan, dan dengan membentuk RMC dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggungjawab pengawasan manajemen risiko dibandingkan dengan proporsi komisaris independen yang rendah. selain itu , dengan pembentukan RMC maka akan lebih fokus pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko perusahaan.

Penelitian Yatim (2009) memberikan sebuah hasil yaitu sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen yang besar cenderung untuk membentuk RMC untuk meningkatkan kemampuan pengawasan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H1(a) : Proporsi komisaris independen berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.**

**H1(b) : Proporsi komisaris independen berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang terpisah dari Komite Audit.**

#### **2.4.2 Ukuran Dewan dengan Keberadaan RMC**

Keberadaan RMC mungkin juga berhubungan dengan ukuran dewan. Ukuran dewan yang besar cenderung dapat menjadi sumber daya yang besar bagi

dewan komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan memberikan kekuatan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Hal ini juga merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting untuk mengurangi biaya keagenan yang akan timbul.

Ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite – komite yang dibentuk dewan komisaris yang ditunjukkan untuk manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi dewan komisaris membentuk RMC, dan tingkat sumber daya yang ditawarkan oleh ukuran dewan yang besar akan membuat dewan komisaris lebih menyukai dibentuknya RMC.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H2(a) : Ukuran dewan berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit.**

**H2(b) : Ukuran dewan berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang terpisah dari Komite Audit.**

### **2.4.3 Reputasi Auditor dengan Keberadaan RMC**

Auditor merupakan mekanisme pengawasan eksternal dari sebuah organisasi, dan akhir – akhir ini menjadi pusat perhatian bagi manajemen risiko.

Teori *agency* juga menyatakan bahwa alat monitor eksternal seperti auditor eksternal merupakan alat monitor yang penting untuk mengawasi perilaku manajemen. Ukuran perusahaan audit dapat berpengaruh terhadap pembentukan komite baru (Chen, *et al.*, 2009). Perusahaan audit yang tergabung dalam *Big Four* dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan internal kliennya dibandingkan dengan auditor non *Big Four* (Cohen (2004) dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Tuntutan seperti itu dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga kualitas audit dan untuk melindungi reputasi mereka. Oleh karena itu, tekanan yang lebih besar akan terdapat pada perusahaan yang menggunakan jasa audit *Big Four* untuk membentuk RMC dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa audit non *Big Four*. Selain itu, pembentukan RMC yang terpisah dari komite audit akan dipilih oleh auditor Big Four dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dari pengawasan dan penilaian risiko perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Yatim (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor Big Four cenderung untuk membentuk RMC.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H3(a) : Reputasi auditor berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.**

**H3(b) : Reputasi auditor berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang terpisah dari Komite Audit.**



#### **2.4.4 Kompleksitas dengan Keberadaan RMC**

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Kompleksitas yang lebih besar meningkatkan risiko pada tingkat level yang berbeda termasuk risiko operasional dan teknologi yang menuntut terhadap permintaan yang lebih besar untuk mengawasi risiko tersebut (Subramaniam *et al.*, 2009). Semakin besar segmen bisnis yang dimiliki perusahaan maka akan membutuhkan mekanisme manajemen risiko yang efektif. Hal ini akan menyebabkan pembentukan RMC menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan.

Penelitian Yatim (2009) membuktikan bahwa kompleksitas dari operasi perusahaan membutuhkan pengawasan yang lebih besar dari RMC yang secara utama berfokus untuk mengidentifikasi risiko bisnis dan menemukan cara untuk mengurangi risiko tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H4(a) : Kompleksitas berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.**

**H4(b) : Kompleksitas berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang terpisah dari Komite Audit.**

#### **2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan dengan Pengungkapan RMC**

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvart, 2005 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Pembentukan RMC akan memfasilitasi pengawasan yang lebih baik dari risiko – risiko tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H5(a) : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit.**

**H5(b) : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang terpisah dari Komite Audit.**

#### **2.4.6 Leverage dengan Keberadaan RMC**

*Leverage* adalah rasio untuk memperlihatkan seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam memenuhi aktivitya. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan membuat keadaan keuangan perusahaan menjadi memburuk, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Dengan adanya risiko tersebut tentu pembentukan RMC akan menjadi mekanisme yang penting dalam mengawasi risiko tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H6(a) : *Leverage* berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.**

**H6(b) : *Leverage* berhubungan positif dan signifikan dengan keberadaan RMC yang terpisah dari Komite Audit.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi variabel penelitian, definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data.

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasi**

Dalam Penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Definisi operasional menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator empiris dalam penelitian ini adalah:

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Dalam Penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

###### **1. Variabel Dependen**

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu keberadaan RMC dimana suatu perusahaan mengungkapkan adanya RMC di dalam laporan tahunannya dan keberadaan RMC yang terpisah dimana

suatu perusahaan mengungkapkan keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri.

## 2. Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu variabel dewan komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan *leverage*.

## 3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu variabel ukuran perusahaan.

### 3.1.2 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Variabel Dependen

##### a. Keberadaan RMC yang tergabung dengan Komite Audit :

RMC adalah *Risk Management Committee* atau Komite Manajemen Risiko merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas untuk menyusun kebijakan dan meninjau efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada suatu perusahaan. Dalam penelitian ini keberadaan RMC diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC yang tergabung dengan Komite Audit diberi nilai satu (1), sedangkan diberi nilai nol (0) apabila perusahaan tidak mengungkapkan keberadaan RMC yang

tergabung dengan Komite Audit dalam laporan tahunannya (Subramaniam, *et al.*, 2009).

b. Keberadaan RMC yang terpisah :

RMC yang terpisah adalah *Risk Management Committee* atau Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri. Dalam penelitian ini keberadaan RMC yang terpisah diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit diberi nilai satu (1), sedangkan diberi nilai nol (0) apabila perusahaan mengungkapkan keberadaan RMC yang bergabung dengan komite audit dalam laporan tahunannya (Subramaniam, *et al.*, 2009).

## 2. Variabel Independen

Karakteristik Dewan Komisaris :

a. Komisaris Independen (INDPCOMM)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga, bisnis, dan urusan lainnya dengan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang

saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya (Alijoyo dan Zaini, 2004). Dalam penelitian ini independensi dewan komisaris dinyatakan dalam persentase jumlah anggota komisaris independen pada dewan komisaris dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{INDPCOMM} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

b. Ukuran Dewan (BOARDSIZE)

Ukuran dewan adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris akan berdampak pada kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004). Ukuran dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Karakteristik Perusahaan :

c. Reputasi Auditor (BIGFOUR)

Reputasi auditor ditunjukkan dengan apakah suatu perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternalnya yang tergabung dalam KAP *Big Four* yang merupakan suatu kelompok KAP internasional. Dalam

penelitian ini, reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tergabung dalam *Big Four* diberi nilai satu (1), dan sebaliknya diberikan nilai nol (0) (Subramaniam, *et al.*, 2009).

d. Kompleksitas (BUSSEGMENT)

Kompleksitas dari sebuah perusahaan adalah jumlah segmen bisnis yang dimiliki perusahaan tersebut. Kompleksitas yang lebih besar akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Kompleksitas dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah segmen bisnis / usaha yang dimiliki oleh perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009).

e. Risiko Pelaporan Keuangan (FINRISK)

Risiko pelaporan keuangan ditunjukkan oleh proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan. Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini risiko pelaporan keuangan diukur dengan menjumlah piutang dan persediaan dibagi dengan total aset (Subramaniam, *et al.*, 2009).



$$\text{FINRISK} = \frac{\text{Piutang usaha} + \text{Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

f. *Leverage* (LEV)

*Leverage* suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi pada suatu waktu. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan membagi total hutang dengan total aset (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

### 3. Variabel Kontrol

a. Ukuran perusahaan (SIZE)

Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menjumlah total aset yang dimiliki perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009).

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan finansial non perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2009

– 2010. Hal ini untuk mengetahui perkembangan pengungkapan RMC pada perusahaan finansial non perbankan selama tahun 2009 sampai dengan 2010.

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2009 hingga 2010.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan pada periode 2009 – 2010.
- c. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari tahun 2009 hingga 2010.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber – sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 – 2010. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI <http://www.idx.co.id/> dan pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka dan studi observasi. Metode studi pustaka yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam lingkup penelitian ini.

Sedangkan metode studi observasi, yaitu dengan cara memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI di situsnya dan pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Data yang digunakan merupakan data *time series*.

### **3.5 Metode Analisis**

Bagian ini berisi deskripsi tentang jenis atau teknik analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian.

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean, nilai minimal dan maksimal serta standar deviasi semua variabel tersebut.

### 3.5.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Logistic Regression* (Regresi Logistik). Regresi Logistik tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedasitas, dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya (Ghozali, 2006). Regresi logistik sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini karena variabel dependen dalam penelitian ini *dichotomous* (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keberadaan RMC di dalam perusahaan perbankan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) sehingga Regresi Logistik dapat dipakai (Ghozali, 2006).

Persamaan Regresi Logistik dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} \text{Logit(RMC)} = & \alpha + \beta_1 (\text{INDPCOMM}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 \\ & (\text{BIGFOUR}) + \beta_4 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_5 (\text{FINRISK}) \\ & + \beta_6 (\text{LEV}) + \beta_7 (\text{SIZE}) + e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Logit(SRMC)} = & \alpha + \beta_1 (\text{INDPCOMM}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 \\ & (\text{BIGFOUR}) + \beta_4 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_5 (\text{FINRISK}) \\ & + \beta_6 (\text{LEV}) + \beta_7 (\text{SIZE}) + e \end{aligned}$$

## Keterangan :

RMC	=	Variabel <i>dummy</i> keberadaan RMC, dimana perusahaan yang memiliki RMC bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
SRMC	=	Variabel <i>dummy</i> keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit, dimana perusahaan yang memiliki RMC terpisah dari komite audit bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
$\alpha$	=	Konstanta
INDPCOMM	=	Proporsi komisaris independen
BOARDSIZE	=	Ukuran dewan
BIGFOUR	=	Variabel <i>dummy</i> dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal <i>Big Four</i> diberi nilai 1, dan 0 untuk sebaliknya.
BUSSEGMENT	=	Kompleksitas
FINRISK	=	Risiko pelaporan keuangan
LEV	=	<i>Leverage</i>
SIZE	=	Ukuran perusahaan

## Analisis pengujian model regresi logistik :

### 1. Menilai Model Regresi

Regresi logistik adalah model regresi yang sudah mengalami modifikasi, sehingga karakteristiknya sudah tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu, penentuan signifikansi secara statistik berbeda dalam regresi berganda. Kesesuaian model (*goodness of fit*) dapat dilihat dr  $R^2$  ataupun F test.

Penilaian model regresi logistik dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai probabilitas (sig.) pada uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sama atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2006).

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data.

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

### 2. Menilai *Overall Model Fit*

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) ditunjukkan dengan *Log likelihood value* (nilai - LL) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai - 2LL pada awal (block number = 0 ), dimana model hanya memasukkan

konstanta dengan nilai  $-2LL$ , pada saat *Block Number* = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai  $-2LL$  *Block Number* = 0 > nilai  $-2LL$  *Block Number* = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. *Log likelihood* pada regresi logistik mirip pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan *log likelihood* menunjukkan model yang semakin baik.

### 3. Menguji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam Regresi Logistik menguji  $R^2$  menggunakan uji Cox & Snell dan Nagelkerke (Ghozali, 2006).

### 4. Menguji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan *Wald Statistic* dan nilai profitabilitas (sig.) dengan cara nilai *Wald Statistic* dibandingkan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ). Untuk

menentukan penerimaan atau penolakan  $H_0$  didasarkan pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% dengan kriteria :

- a.  $H_0$  tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.)  $> \alpha$  (5%), hal ini berarti  $H_a$ . alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen ditolak.
- b.  $H_0$  ditolak apabila nilai probabilitas (sig.)  $> \alpha$  (5%), hal ini berarti  $H_a$ . alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen diterima.